

Ringkasan
Kebijakan 3 EFI

Fasilitas FLEGT UE

Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kemitraan sukarela – Pendekatan Uni Eropa



Upaya ini dibiayai oleh Uni Eropa



Kebijakan 3 EFI
2009





Pemerintah Finlandia mendukung pendekatan FLEGT Eropa untuk menghubungkan pasar internasional yang bekerja secara bertanggung jawab dengan perlindungan hutan di seputar dunia. Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) bisa menyediakan mekanisme yang baru dan inovatif untuk mendukung negara-negara yang ingin mengelola hutan dengan lebih baik, meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan melindungi sumber daya alam. VPA juga bisa memberikan dampak positif terhadap kapasitas negara-negara mitra untuk menanggapi persyaratan pasar internasional yang terus berubah untuk kayu dan karbon.

Paavo Väyrynen
Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan, Finlandia



Kata Pengantar

Pembalakan liar bisa berdampak menghancurkan terhadap sebagian dari hutan paling berharga yang tersisa di dunia maupun warga masyarakat yang tinggal di dalamnya serta bergantung pada sumber dayanya. Efek lingkungan hidup ini mencakup penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati serta emisi gas rumah kaca.

Komisi Eropa telah menerbitkan Rencana Tindakan mengenai Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) pada tahun 2003, yang menguraikan berbagai langkah yang tersedia bagi Uni Eropa dan Negara-Negara Anggotanya untuk menangani pembalakan liar di berbagai hutan yang ada di dunia. Lingkup Rencana Tindakan tersebut dicakup dalam Ringkasan Kebijakan 2 EFI. Dokumen ini meyoroti secara terperinci salah satu dari langkah-langkah tersebut – Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT. Kesepakatan kemitraan sukarela merupakan kesepakatan bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu tropis, yang dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan serta menjamin bahwa kayu yang diimpor ke UE berasal dari sumber yang legal.

¹ http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_policy_brief_2_in_net.pdf



Andreas Knoell



David Young, Global Witness

Penandaan dan pencatatan kayu gelondongan dengan cara yang dapat diandalkan merupakan komponen yang vital pada sistem pelacakan kayu dan modul yang disyaratkan pada jaminan legalitas di negara-negara VPA FLEGT. Penandaan dengan menggunakan cat dan/ atau palu penanda merupakan metode yang paling umum digunakan dalam sektor kehutanan. Selain teknik ini, berbagai metode penandaan yang baru-baru ini dikembangkan seperti label kode bar dan label Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) kini mulai digunakan untuk mengidentifikasi kayu gelondongan dan untuk menjumlahkan volume kayu dalam rantai pasokan nasional.

Inspektur dari Harwood Timber Sdn Bhd yang mengelola kayu gelondongan di pos pengecekan pada divisi Bintulu, Sarawak; Malaysia. Pengecekan fisik merupakan bagian penting dari setiap sistem pelacakan kayu untuk membuktikan bahwa spesifikasi kayu gelondongan (misalnya volume, panjang, spesies, diameter) cocok dengan spesifikasi yang dicatat dalam pangkalan data pelacakan kayu. Lokasi pengambilan contoh, metode dan intensitas pengecekan fisik akan bergantung pada tingkat risiko penyalahgambaran.

U E terus mengembangkan kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang mengekspor produk kayu ke UE, yang disebut Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) FLEGT. Karena ini adalah kesepakatan perdagangan, UE melakukan perundingan atas nama semua Negara Anggota Eropa secara bersama-sama. Seperti yang ditunjukkan oleh nama tersebut, kesepakatan ini bersifat sukarela bagi negara-negara pengekspor. Akan tetapi, begitu dimulai, kesepakatan tersebut akan bersifat mengikat secara hukum terhadap kedua belah pihak, mewajibkan mereka untuk hanya melakukan perdagangan kayu yang legal. Berdasarkan kesepakatan ini, negara-negara pengekspor mengembangkan

sistem untuk memverifikasi legalitas ekspor kayu mereka ke UE. Komisi Eropa dan Negara-Negara Anggota UE menyediakan dukungan untuk membantu mengimplementasikan sistem tersebut.

Kesepakatan Kemitraan Sukarela terdiri dari empat tahap:

1. Persiapan, di mana negara-negara menjelajahi lingkup model Kemitraan ini dan memperkirakan apakah kebutuhan sektor kehutanan mereka akan terpenuhi
2. Perundingan, di mana para mitra menyepakati standar dan sistem jaminan, dan di atasnya mereka akan mendasarkan kesepakatan perdagangan kayu mereka

3. Pengembangan, di mana para pihak mengembangkan sistem seperti yang telah disepakati serta mengevaluasi kredibilitasnya
4. Pelaksanaan penuh, di mana sistem ini sudah mulai berjalan dan hanya kayu legal berizin yang dapat diekspor dari negara mitra ke pasar Eropa.

Apabila suatu kesepakatan telah diimplementasikan sepenuhnya, impor dari negara mitra ke Uni Eropa tentu memerlukan surat izin FLEGT. Impor dari negara mitra tanpa surat izin akan dilarang. Perdagangan produk kayu dari negara non-mitra tidak akan terpengaruh. Untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut ditegakkan, setiap Negara



Perundingan VPA di Ghana merupakan pengalaman belajar yang unik. Saya mengaitkan perbedaan yang mencolok pada proses tersebut dengan gabungan tiga faktor inovatif: perlunya mempertemukan pemangku kepentingan sektor utama untuk mencapai satu maksud yang sama dalam batas waktu yang telah ditetapkan; perlunya menyejajarkan aspirasi tata pemerintahan nasional dengan persyaratan pasar internasional; dan para pengamat internasional yang antusias yang mampu mempengaruhi debat nasional setiap saat. Tantangannya sekarang, antara lain, untuk membangun di atas pengalaman yang dinamis ini, dan memanfaatkan pembelajaran baru demi memberi informasi untuk inisiatif-inisiatif kebijakan masa depan yang berkaitan dengan masyarakat, tata kelola sumber daya, pasar dan penetapan standar internasional.

*Chris Beeko
Komisi Kehutanan Ghana, Ghana*

Anggota Eropa akan menyiapkan sistem untuk menghentikan pengiriman yang dilarang.

Apa yang diupayakan untuk dicapai oleh VPA?

Negara-negara penghasil kayu yang telah bergabung dalam kemitraan FLEGT melihatnya sebagai sarana untuk mengamankan dan meningkatkan akses mereka ke pasar Eropa serta mengangkat reputasi negara serta produk kayu mereka. VPA juga dapat mendukung program reformasi sektoral dan meningkatkan pengumpulan pendapatan dari sektor kayu.

Dari sisi UE, kemitraan ini merupakan bagian dari pengakuan yang eksplisit bahwa konsumen Eropa menggunakan produk kayu dalam jumlah

yang cukup signifikan dari wilayah-wilayah di mana terdapat tingkat ilegalitas yang tinggi dan tata kelola sektor kehutanan yang buruk. Ini berpotensi menyediakan pasar kayu ilegal maupun laba bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ilegal. Dengan memastikan bahwa impor kayu dari Negara Mitra FLEGT dilakukan secara legal, UE dapat menciptakan insentif ekonomi untuk meningkatkan tata kelola kehutanan. Tujuannya bukan sekadar mengurangi penggundulan hutan ilegal, tetapi berupaya menangani kemiskinan dan mendorong pembangunan, karena tata kelola kehutanan dapat mengurangi konflik dan eksploitasi di dalam kawasan hutan serta menciptakan iklim

1. PERSIAPAN

Dialog informal, penyediaan informasi mengenai sasaran dan kebutuhan FLEGT, kajian tata kelola, serta identifikasi pemangku

Interaksi multi-pihak (instansi-instansi pemerintah, industri, LSM)

2. PERUNDINGAN

Perundingan bilateral formal, diakhiri dengan tercapainya kesepakatan yang mengikat secara hukum mengenai:

1. Definisi kayu legal
2. Sistem pelacakan kayu
3. Kepatuhan terhadap definisi legalitas dan penerapan sistem pelacakan kayu
4. Penerbitan surat izin FLEGT
5. Pemantauan independen

Para mitra perundingan: UE dan pemerintah negara tersebut.
Informasi dan dukungan melalui proses multi-pihak

3. PENGEMBANGAN

Implementasi dan penilaian independen terhadap sistem penjamin legalitas yang disepakati dalam VPA

Pemerintah mengimplementasikan dan didukung oleh para donor.
Pengamatan dan informasi dari para pemangku kepentingan

4. IMPLEMENTASI

Bekerjanya secara penuh sistem perizinan, penolakan impor kayu tak berizin ke UE

Diawasi oleh Komite Pelaksanaan Gabungan.
Informasi dari para pemangku kepentingan

yang lebih baik untuk investasi jangka panjang dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Akan tetapi, kesepakatan, dan sistem transparan yang mendukung surat izin legalitas nasional, bukan merupakan solusi cepat untuk sementara. Pada umumnya, kesepakatan ini mungkin memerlukan beberapa tahun untuk dirundingkan dan kemudian dilaksanakan. Meskipun demikian, banyak pihak mengharapkan perdagangan dan bantuan ini berpotensi untuk menjadi salah satu langkah signifikan untuk melindungi hutan yang terancam punah serta membina pengelolaan hutan yang legal dan berkelanjutan di negara-negara mitra.



Jade Saunders, EFI

Kayu gelondongan di pelabuhan Kribi, Kamerun, sedang menunggu dikirim ke Douala untuk ekspor internasional.

Sistem Jaminan Legalitas (LAS)

Kredibilitas setiap VPA bergantung pada pengembangan Sistem Jaminan Legalitas (LAS), dengan alasan-alasan teknis yang diperinci dalam kesepakatan tersebut. Sistem ini harus konsisten dan logis serta dapat diandalkan, serta didasarkan atas undang-undang dan lembaga negara mitra. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi dan memberikan surat izin bagi kayu yang dihasilkan secara legal, dan memastikan bahwa hanya kayu legal yang diekspor ke Uni Eropa.

Sistem yang efektif untuk memastikan legalitas mencakup pengecekan operasi hutan serta pengendalian pengangkutan dan pengolahan kayu melalui beberapa pemilik yang berbeda, mulai dari pemungutan sampai ke tahap ekspor.

Setelah perincian LAS disepakati dan kesepakatan kemitraan ditandatangani, maka

akan ada suatu periode waktu yang disepakati bagi negara mitra untuk mengimplementasikan sistem yang diperlukan dan memastikan bahwa sektor swasta mampu memenuhi persyaratan-persyaratannya. Begitu sistem ini diimplementasikan, hanya kayu berizin dari negara tersebut yang akan diterima di perbatasan UE, dan para eksportir kayu ilegal tidak akan bisa lagi melakukan perdagangan dengan Uni Eropa.

LAS yang kokoh mempunyai lima unsur utama:

1. Definisi yang jelas tentang kayu legal
2. Mekanisme untuk mengendalikan kayu pada waktu beredar di negara mitra
3. Lembaga yang disetujui pemerintah untuk memverifikasi bahwa undang-undang telah dipatuhi dan sistem pengendalian diterapkan dengan ketuntasan yang memadai

“

Dengan amendemen Lacey Act yang baru, ada perubahan lanskap bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis dengan AS. Setiap usaha yang ingin mematuhi Lacey, dan menghindari risiko penyitaan, denda atau bahkan hukuman penjara, akan mencari sumber kayu dengan benar-benar memperhatikan legalitasnya. Mekanisme yang bermakna untuk membentuk dan memverifikasi legalitas, khususnya di daerah-daerah yang berisiko tinggi, akan terbukti sangat penting untuk membimbing pengambilan keputusan tentang sumber perolehan kayu guna meminimalkan risiko. Sistem pemberian izin VPA yang kokoh dapat menawarkan jenis alat yang persis seperti itu bagi perusahaan-perusahaan di negara mitra maupun para pembeli mereka.”

Andrea Johnson

Badan Investigasi Lingkungan Hidup, Washington DC

4. Pihak berwenang penerbit izin ekspor

5. Lembaga independen untuk memantau

bahwa seluruh sistem berfungsi dengan baik

Untuk bimbingan yang lebih terperinci mengenai unsur-unsur dalam Sistem Jaminan Legalitas, lihat Catatan Pengarahan FLEGT Komisi Eropa.²

Apa yang dimaksud dengan kayu legal?

Kesepakatan Kemitraan Sukarela mewajibkan UE dan para mitranya untuk melakukan perdagangan kayu legal saja. Untuk itu, setiap pihak perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang tersangkut dalam produksi legal di negara mitra. Seperti disebutkan di atas, definisi didasarkan atas undang-undang dan peraturan negara mitra masing-masing. Akan tetapi, Uni Eropa telah mewajibkan diri, melalui Rencana Tindakan FLEGT dan sejumlah



Global Witness merintis Pemantauan Hutan Independen (IFM) karena percaya bahwa keterlibatan masyarakat sipil yang diberi bentuk formal dalam proses pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) sangat penting bagi setiap sistem tata pemerintahan, dan karena itu menyambut komitmen Eropa sebagai komponen utama dalam Sistem Jaminan Legalitas FLEGT. Pemantau independen berperan untuk menyediakan pengawasan eksternal terhadap semua komponen lain dalam sistem jaminan legalitas (LAS) dan dengan demikian memberikan kredibilitas publik kepada sistem tersebut. Kekuatan dan kesehatan pemantauan bergantung pada standar minimum kemandirian, akses ke informasi, serta kebebasan untuk membuat laporan. Apabila hal-hal ini tidak ada, maka akan timbul risiko serius di mana IFM akan menjadi simbol pertanggungjawaban – yang secara rutin menghasilkan laporan tetapi secara rutin juga tidak mendapatkan cerita yang sesungguhnya – sehingga akan melemahkan ikatan suatu negara dengan para warga negaranya sehingga mustahil bagi konsumen Eropa untuk merasa yakin kepada produk yang diberikan izin berdasarkan sistem ini.

David Young
Global Witness

Kapal-kapal penangkap ikan yang terbuat dari batang pohon di Kribi, Kamerun. Selain memberikan kontribusi kepada pendapatan ekspor, hutan juga berperan penting dalam menyediakan makanan, kayu bakar, bahan bangunan, kayu untuk ukiran dan tanaman obat.

Jade Saunders, EFI



kesepakatan internasional, untuk memegang teguh pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sehingga negara-negara mitra didorong untuk mempertimbangkan ketiga pilar keberlanjutan sewaktu menetapkan standar nasional mereka. Umumnya, hal-hal yang tercakup dalam undang-undang meliputi perlindungan lingkungan hidup, aturan penebangan, pembayaran biaya, perdagangan kayu dan peraturan pengangkutan serta hak-hak atas properti, termasuk hak masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka.

Pengembangan standar legalitas nasional untuk kesepakatan FLEGT merupakan tanggung jawab pemerintah di setiap negara mitra. Akan tetapi, diakui bahwa kredibilitas kesepakatan, serta kecocokan untuk pasar Eropa, menuntut agar kesepakatan tersebut dirumuskan melalui proses politik yang terbuka dan berjangkauan

luas. Berbagai proses ini merupakan pengakuan akan fakta bahwa kegagalan merespek undang-undang kehutanan dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai lembaga dan kelompok masyarakat – pemerintah, sektor swasta, masyarakat luas serta masyarakat lokal dan pribumi – dengan cara yang berbeda-beda. Standar legalitas yang sah secara politik perlu melibatkan konsultasi yang luas dengan semua kelompok yang terkena dampak.

Selama proses penetapan standar legalitas, kekurangan dalam kerangka hukum yang ada mungkin akan terlihat – misalnya celah dalam peraturan perundang-undangan atau prosedur yang terlalu rumit. Karena itu, kesepakatan ini mungkin bisa memperkirakan reformasi terhadap kerangka hukum nasional dalam kasus-kasus demikian.

Selain menjadi dasar bagi pemberian izin ekspor FLEGT, standar legalitas nasional ini

bisa diterapkan oleh badan sertifikasi sebagai salah satu unsur utama pengelolaan hutan yang berkelanjutan di negara mitra.

Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kayu yang diekspor ke UE adalah kayu legal?

Untuk memastikan bahwa kayu yang diekspor adalah kayu yang dihasilkan secara legal, dibutuhkan sistem yang dapat memantau pergerakan kayu dan produk dari saat panen sampai ekspor. Banyak perusahaan di seluruh dunia sudah mempunyai sistem demikian untuk operasi terpisah yang mereka jalankan, tetapi kesepakatan FLEGT mewajibkan negara-negara mitra untuk mengembangkan sistem nasional yang mencakup semua perusahaan domestik dan internasional yang mengekspor kayu ke UE. Di samping itu, beberapa negara memilih untuk menerapkan sistem mereka dengan cara



Niina Verkerk, EFI

Mengecek pekerjaan pencatatan di sebuah pabrik, di Indonesia.

yang lebih luas, misalnya dengan memastikan kepatuhan kepada hukum dalam perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ke pasar lain, atau juga mencakup produksi untuk pasar dalam negeri. Sistem-sistem ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak penggunaan sudah ada dan pengolahan dilakukan sesuai dengan undang-undang nasional. Selain ini, sistem tersebut harus memastikan bahwa kayu ilegal tidak akan mendapatkan izin sebagai kayu legal belakangan dalam proses produksi. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa jumlah kayu yang berizin untuk ekspor tidak lebih dari jumlah kayu yang dipungut secara legal – dengan mengukur dan mencocokkan volume kayu pada sejumlah titik di seluruh rantai pasokan setiap perusahaan maupun di seluruh proses produksi kayu nasional.

Selain menghasilkan kayu, beberapa mitra juga mengimpor kayu dari negara-negara tetangga, dan mengolahnya sebelum mengekspor produk akhir ke Uni Eropa. Dalam kasus ini, sistem pengendalian harus mampu memastikan bahwa kayu dari sumber luar juga diimpor secara legal.

Bagaimana kita dapat merasa yakin bahwa sistem yang mendukung VPA benar-benar berfungsi?

Supaya konsumen Eropa yakin bahwa mereka tidak membeli kayu ilegal, dan agar negara mitra yakin bahwa peraturan sektor kehutanan mereka efektif, maka setiap VPA mencakup komitmen untuk melakukan pengauditan reguler terhadap kepatuhan kepada hukum. Pengauditan dapat dilakukan oleh pemerintah negara mitra atau



Diskusi multi-pihak nasional yang menghasilkan standar legalitas kayu dan sistem verifikasi merupakan peluang pertama yang dimiliki beberapa pemangku kepentingan hutan Indonesia untuk memahami beberapa dari banyak undang-undang yang kompleks yang berlaku bagi hutan di sini. Proses ini telah memberdayakan masyarakat sipil untuk benar-benar terlibat dalam perancangan definisi legalitas yang dapat dipercaya sebaliknya daripada hanya merasa didikte oleh pemerintah dan bisnis besar.

Bila Indonesia ingin mengatasi penggundulan hutan, maka beberapa pertanyaan sulit yang berkaitan dengan politik dan ekonomi harus benar-benar bisa dipahami—konversi pertanian, hak atas tanah – dan penanganan pembalakan liar serta perdagangan kayu ilegal termasuk salah satu di antaranya. Pelaksanaan sistem perizinan yang saksama, termasuk pengauditan independen, transparansi, dan pemantauan masyarakat sipil, tentu merupakan satu langkah yang jujur untuk mencapainya. Bila suatu VPA yang dapat dipercaya bisa berlanjut, kita akan merasakan bahwa memang ada peluang untuk masa depan yang berkelanjutan bagi hutan Indonesia.

*Mardi Minangsari
Telapak, Indonesia*

oleh organisasi yang dipilih. Siapapun yang melakukan pengecekan kepatuhan ini, harus jelas tercantum dalam Kesepakatan kapan dan bagaimana pengecekan akan dilakukan dan tindakan apa saja yang perlu diambil apabila ada masalah yang teridentifikasi.

Agar integritas mendapat jaminan yang pasti, sebuah organisasi independen juga harus diberi tanggung jawab untuk memeriksa seluruh sistem pengendali, termasuk pengecekan verifikasi secara reguler, dan harus ada cara untuk memperingatkan badan pengatur apabila terdapat kesalahan sistemik atau spesifik dalam sistem perizinan.

Apabila sistem yang kokoh sudah siap untuk mengidentifikasi dan memeriksa kayu legal, ekspor dapat diberikan surat izin.



Diskusi baru-baru ini mengenai investasi di kawasan hutan tropis telah bergeser jauh dan tiba-tiba ke masalah pembayaran untuk mengurangi emisi dari penggundulan hutan dan degradasi (REDD). Di sini ada kesempatan yang besar, tetapi juga risiko yang tinggi, dan kita harus bergerak maju secara hati-hati, dengan memanfaatkan pelajaran yang telah kita dapatkan dari upaya selama 50 tahun yang dibuat oleh negara-negara maju untuk meningkatkan konservasi hutan di negara berkembang.

Kemitraan Sukarela FLEGT mempunyai beberapa ciri penting yang perlu dikaji dengan cermat pada waktu kita memikirkan tentang sumber pendanaan baru dan orientasi baru untuk pengembangan hutan: proses penetapan standar nasional berjangkauan luas yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tentang hak atas tanah dan sumber daya, dialog multi-pihak untuk memberi saran dan memandu kebijakan pemerintah, pengauditan independen dan transparan terhadap semua pendanaan dan keputusan pemerintah, serta pemanfaatan insentif keuangan untuk menggerakkan pengungkapan informasi serta mendukung kemajuan yang meyakinkan pada waktunya.

Supaya efektif dan serius, upaya internasional untuk memberi perhatian kepada adaptasi dan peringanan perubahan iklim harus mengambil langkah-langkah yang serupa, menjadikan klarifikasi serta pengamanan hak-hak atas properti sebagai prioritas utama, dan memperluas diskusi di meja perundingan agar mencakup semua pemangku kepentingan terkait.

*Andy White
Inisiatif Hak dan Sumber Daya*

Komitmen Eropa

Selain mengurangi permintaannya akan kayu yang kemungkinan ilegal, Komisi Eropa dan Negara Anggota mendukung negara-negara mitra untuk melakukan investasi dalam sistem yang dibutuhkan untuk mengelola sektor kehutanan mereka dengan cara yang medatangkan manfaat di negara mereka, dan, dalam hal pengurangan emisi gas pemanasan global akibat penggundulan hutan, medatangkan manfaat bagi seluruh dunia. Untuk jangka waktu yang lebih panjang, diharapkan bahwa meningkatnya pengumpulan pendapatan di negara-negara mitra akan menutup biaya-biaya yang ada.

Komisi Eropa juga mewakili Negara-Negara Eropa, sambil bekerja sama dengan negara pengekspor, dalam memantau – bersama

dengan negara mitra – fase Pengembangan dan Implementasi Penuh kesepakatan tersebut. Melalui pemantauan bersama ini, setiap konflik dapat diatasi dan, apabila perlu, kesepakatan tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila kesepakatan itu dirasakan tidak memenuhi harapan mereka.

Walaupun berada di luar lingkup kesepakatan bilateral, seperti disebutkan di atas, Komisi Eropa juga berharap agar negara mitra dapat menggunakan sistem jaminan mereka untuk memastikan bahwa ekspor ke negara lain di luar Eropa bersifat legal; dan agar para pembeli kayu di luar Uni Eropa dapat membeli kayu berizin FLEGT, merasa yakin bahwa mereka tidak melakukan perdagangan kayu ilegal.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memberikan tanggapan terhadap para konsumen yang semakin sensitif di Eropa, AS dan Jepang dengan ikut serta dalam program sukarela untuk membuktikan asal-usul yang sah dari kayu-kayu mereka. Menetapkan sebuah sistem untuk membuktikan Asal-Usul Sah yang telah Diverifikasi dipandang sebagai langkah pertama untuk mendapatkan sertifikasi di pabrik-pabrik yang mendukung metode-metode yang sudah maju di Indonesia.



Pengakuan kayu berizin FLEGT di pasar Eropa

Untuk menghasilkan dampak yang paling besar, Rencana Tindakan FLEGT menggunakan pendekatan yang luas, dengan memasukkan berbagai inisiatif untuk mempertemukan berbagai kebijakan perdagangan yang berada di bawah kendali UE, dan pembelian yang dilakukan secara bertanggung jawab oleh pemerintah dan importir kayu di Negara Anggota. Karena VPA bersifat bilateral dan sukarela, pada bulan Oktober 2008 Komisi Eropa mengusulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Eropa yang akan mewajibkan para operator yang memasukkan produk kayu di pasar UE untuk menyiapkan sistem yang dapat memastikan bahwa kayu mereka berasal dari sumber yang legal. Usul tersebut secara tegas



Niina Verkerk, EFI

Industri mebel di Indonesia didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Industri tersebut mempekerjakan antara 250.000 hingga 500.000 orang, tetapi ASMINDO (Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Tangan Indonesia) melaporkan jumlah yang jauh lebih tinggi karena praktek sub-kontrak kepada industri-industri yang bersifat informal sudah umum dilakukan.

mengakui produk berizin FLEGT dari negara mitra sebagai bukti legalitas. Langkah demikian akan mencakup berbagai ragam produk termasuk perabot dan kertas, yang dibuat dari kayu impor di negara-negara di luar Uni Eropa.

Selain langkah-langkah yang diambil di Eropa, setiap pemerintah Negara Anggota kini dianjurkan untuk membeli kertas, kayu konstruksi, perabot kantor dan hasil hutan lain yang legal dan berkelanjutan. Ada juga upaya untuk menyadarkan perusahaan-perusahaan di UE tentang mengenai jawab mereka untuk membeli kayu legal dan berkelanjutan, serta membantu mereka mengembangkan alat untuk melakukannya dengan mudah.

“

Apabila sertifikasi sukarela yang dapat diandalkan belum merupakan arus utama di suatu negara, maka pemberian izin wajib FLEGT merupakan alternatif untuk menjamin bahwa hanya kayu legal yang masuk dan keluar dari Malaysia untuk memasok pasar Eropa. Aspirasi di pihak kedua pemerintah untuk mengadakan VPA secara efisien patut dipuji dan akan dipandang secara positif oleh kelompok-kelompok lingkungan hidup dengan ketentuan bahwa masalah-masalah yang diidentifikasi selama evaluasi teknis independen tersebut diberi perhatian atau diakui sebagai persyaratan untuk penandatanganan. Untuk memastikan bahwa pemberian izin tersebut dapat diandalkan, pemerintah Malaysia perlu bersikap terbuka untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang terinformasi dari berbagai kelompok lingkungan hidup dan sosial ke dalam proses VPA dan seharusnya tidak membatasi keterlibatan mereka pada sesi konsultasi atau pengarahannya saja tetapi sebaliknya perlu mengundang kelompok yang terlibat untuk bergabung dengan komite teknis terkait dan menjadi anggota Badan Pelaporan atau Komite Pelaksanaan Gabungan.

Ivy Wong Abdullah
WWF-Malaysia

Mengingat bahwa VPA mewajibkan para mitra untuk hanya melakukan perdagangan kayu berizin, Komisi Eropa juga telah berjanji untuk mendorong pengakuan akan kayu berizin FLEGT di antara para importir Eropa. Diharapkan bahwa ini akan menjamin bahwa kalangan usaha dan konsumen mengerti bahwa, bila mereka tidak ingin membeli kayu ilegal, mereka harus membayar biaya riil untuk menghasilkan kayu secara legal, ketimbang hanya mencari kayu dengan harga yang paling murah, yang dapat menimbulkan risiko dikorbankannya kepedulian-kepedulian sosial dan lingkungan hidup.

Setiap langkah ini mungkin tidak akan mampu mengurangi akses pasar Eropa ke kayu

ilegal secara signifikan. Tetapi secara kolektif, semua ini membentuk suatu paket berupa langkah-langkah yang konsisten dan logis yang seyogianya akan memantapkan dampaknya masing-masing, serta berpotensi untuk mengurangi insentif ekonomi untuk melakukan penggundulan hutan dan penebangan serta perdagangan ilegal, membantu meningkatkan tata kelola yang baik dalam sektor kehutanan dan pada akhirnya membantu membuat pengelolaan hutan menjadi peluang investasi yang lebih menarik bagi negara dan orang-orang.

Para penulis: Fasilitas FLEGT UE

Penulis untuk korespondensi: Jade Saunders (jade.saunders@efi.int) | Para redaktur seri: Risto Päivinen, Ilpo Tikkanen dan Minna Korhonen

ISBN: 978-952-5453-44-7

© European Forest Institute 2009

Foto sampul: Niina Verkerk

Pernyataan disclaimer: Publikasi ini dibuat dengan bantuan Uni Eropa. Isi publikasi ini semata-mata merupakan tanggung jawab para penulis dan sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pandangan Uni Eropa.



Ringkasan Kebijakan EFI



Informasi berbasis sains yang tidak memihak dan yang relevan dengan kebijakan mutlak perlu untuk pengambilan-keputusan yang sehat. Ringkasan Kebijakan EFI mengangkat berbagai masalah serta tantangan kebijakan mengenai hutan yang ada saat ini dan memberikan garis besar mengenai pilihan-pilihan tindakan untuk mengatasinya dengan bantuan riset.



EUROPEAN FOREST INSTITUTE

Torikatu 34, FIN-80100 Joensuu, Finland
Tel. +358 10 773 4300, Fax. +358 10 773 4377
www.efi.int

Institut Hutan Eropa (European Forest Institute) merupakan jaringan riset hutan terkemuka di Eropa. Ia adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Negara-Negara Eropa untuk melakukan dan mengadvokasi riset hutan, serta meningkatkan jaringan riset hutan melintasi seluruh Eropa. Ia diakui sebagai titik kontak untuk informasi yang relevan dengan kebijakan dan tidak memihak mengenai hutan dan kehutanan.